

**KETERPILIHAN SUTINA– ADO DALAM PILKADA 2020 KABUPATEN
MAMUJU (STUDI TENTANG: KETERLIBATAN ELIT LOKAL DALAM
PILKADA 2020 KABUPATEN MAMUJU)**



Disusun oleh :

ANDI MUHAMMAD AGUNG IZZULHAQ

E11116515

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**KETERPILIHAN SUTINA- ADO DALAM PILKADA 2020 KABUPATEN
MAMUJU (STUDI TENTANG: KETERLIBATAN ELIT LOKAL DALAM
PILKADA 2020 KABUPATEN MAMUJU)**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

OLEH:

ANDI MUHAMMAD AGUNG IZZULHAQ

E11116515

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KETERPILIHAN SUTINA- ADO DALAM PILKADA 2020 KABUPATEN
MAMUJU (STUDI TENTANG: KETERLIBATAN ELIT LOKAL DALAM
PILKADA 2020 KABUPATEN MAMUJU)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI MUHAMMAD AGUNG IZZULHAQ

E11116515

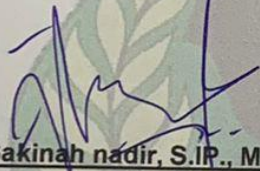
Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

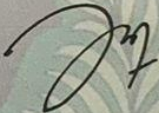
Pada Tanggal : 31 Maret 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Sakinah nadir, S.IP., M.Si.


Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP.


NIP.197311222002121001

NIP.199205022019044001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. Andi Yakub. M.Si.Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 023

**HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI**

**KETERPILIHAN SUTINA- ADO DALAM PILKADA 2020 KABUPATEN
MAMUJU (STUDI TENTANG: KETERLIBATAN ELIT LOKAL DALAM
PILKADA 2020 KABUPATEN MAMUJU)**

Disusun dan Diajukan Oleh :
ANDI MUHAMMAD AGUNG IZZULHAQ

E11116515

**Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. (.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Dr. Imran, S.IP., M.Si (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI MUHAMMAD AGUG IZZULHAQ

NIM : E11116515

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Keterpilihan Sutina – Ado dalam Pilkada 2020 Kabupate Mamuju (Studi tetang: Keterlibata Elit Lokal dalam Pilkada 2020 Kabupate Mamuju)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Mei 2023



Handwritten signature of Andi Muhammad Agung Izzulhaq.

ANDI MUHAMMAD AGUNG IZZULHAQ

ABSTRAK

Andi Muhammad Agung Izzulhaq. NIM E11116515. Keterpilihan Sutina – Ado dalam Pilkada 2020 Kabupaten Mamuju (Studi Tentang: Keterlibatan Elit Lokal Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Mamuju). Dibimbing oleh Pembimbing Utama **Sakinah Nadir** dan pembimbing Pendamping **Ummi Suci Fathia Bailusy**

Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Mamuju punya banyak dinamika didalam prosesnya, dimana salah satu dinamika yang ingin dilihat yaitu peran elit pada kontestasi politik yang cukup terlibat banyak, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elit lokal yang ikut terlibat pilkada 2020 dan untuk mengetahui bagaimana bentuk keterlibatan elit politik lokal dalam proses keterpilihan Sutina-Ado dalam memenangkan kontestasi politik di pemilihan kepala daerah 2020 Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini menggunakan teori elit dan konsep pilkada sebagai arena kontestasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dijelaskan dengan metode Deskriptif Analisis, yang dimana penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa Informan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa ada beberapa elit lokal yang terlibat dalam pilkada serentak 2020, mulai dari elit ekonomi, elit sosial, elit politik, serta bentuk keterlibatan elit dalam pilkada serentak 2020 kabupaten Mamuju masih besar, hal ini dibuktikan dengan peran elit lokal dalam pilkada mulai dari ide sampai material dari tim pemenangan masih di dominasi oleh elit lokal di Kabupaten Mamuju.

Kata Kunci: *Elit Lokal, Pemilihan Kepala Daerah, keterpilihan, masyarakat.*

ABSTRACT

Andi Muhammad Agung Izzulhaq. NIM E11116515. The Election of Sutina - Ado in the 2020 Mamuju Regency Election (Study of: Local Elite Involvement in the 2020 Mamuju Regency Election). Supervised by Principal Supervisor Sakinah Nadir and co-supervisor Umami Suci Fathia Bailusy.

The 2020 Simultaneous Regional Elections of Mamuju Regency have many dynamics in it, where one of the dynamics is the role of elites in political contestation which is quite involved, so this study aims to identify local elites who participated in the 2020 regional elections and to find out how the involvement of local political elites in the Sutina-Ado electoral process in winning political contestations in the 2020 Mamuju Regency regional elections.

This research uses elite theory and the concept of regional elections as an arena for political contestation. This research uses a qualitative research approach and is explained by the Descriptive Analysis method, in which the author conducts in-depth interviews with several informants, namely the elected Regent and Deputy Regent, political figures, businessmen in Mamuju, community leaders, and the general public.

The results of this study explain that the role of elites in the 2020 simultaneous regional elections in Mamuju Regency is still large, this is evidenced by the role of local elites in the elections ranging from ideas to materials from the winning team is still dominated by local elites in Mamuju Regency.

Keywords: *Local Elites, Regional Head Elections, electability, community.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang hingga saat ini masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul; “keterpilihan sutina– ado dalam pilkada 2020 kabupaten mamuju (studi tentang: keterlibatan elit lokal dalam pilkada 2020 kabupaten mamuju”

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir serta memperluas wawasan. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis ucapkan kepada keluarga besar ayahanda Ir. Basrullah, ibunda alm Ir. Andi Nur falah AR Mappagiling, berserta saudara saya yang selalu mensupport yaitu Andi Muhammad Yaum Dzil Arsy, Andi Muhammad Fauzan Ramdhani, Andi Salsabi Dzaul Khair, serta orang tua saya Yang jauh Di kalimantan yaitu ayahanda Johan Amri yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta motivasi dengan penuh pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan.

Dan Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sakinah Nadir, SIP.,M.Si** selaku pembimbing utama dan Ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP.** selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan dengan penuh ikhlas dan kesabaran, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta Staf dan jajarannya.
3. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan staff Departemen Ilmu Politik, **(Alm.) Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA; Prof. Dr. Armin, M.Si; Prof Muhammada M.Si; Dr. Muhammad Saad, MA; Drs. H. A. Yakub,**

M.Si, Ph.D; A. Naharuddin S.IP, M.Si; Dr. Phil Sukri, M.Si, Ph.D;A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si; Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M,Si; Endang Sari, S.IP,M.Si; Ummi Suci Fathiah, S.IP, M.Si; Hariyanto, S.IP, MA; (Alm.)Prof Basir Syam, M.Ag; Imran, S.IP, M.Si; Sakinah Nadir, S.IP, M.Si; Dian Ekawaty, S.IP, MA dan Zulhajar, S.IP, M.Si.

5. Seluruh staf pegawai Departemen Ilmu Politik.
6. Kepada seluruh informan penulis yang berada di Kabupaten Mamuju.
7. Kepada Reformasi 2016 yang selalu memberikan support dalam hal apapun dari awal saya masuk kuliah hingga saat ini.
8. Kepada Akbar Najemuddin S.IP yang selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada saya.
9. Kepada Searah Cafe yang selalu menjadi tempat untuk Menulis Karya Saya.
10. Kepada teman-teman Ilmu Politik 2016 terima kasih atas kerja sama, bantuan dan dukungan selama menempuh perkuliahan.
11. Kepada Himapol FISIP Unhas dan BEM KEMA FISIP Unhas yang menjadi wadah pengembangan diri sehingga saya seperti sekarang.
12. Kepada SOSPOL 2016 yang selalu menghibur dikala penulis lagi pusing.
13. Kepada Kakanda SOSPOL yang banyak memberikan Ilmu bertahan hidup di Kampus.
14. Kepada anak-anak di Nekes yang selalu mengisi waktu luang penulis.

15. Kepada Mace – Mace SOSPOL yang bersedia memberikan asupan Gizi saya selama Di Kampus.
16. Kepada Adik-Adik di Himapol yang selalu menghibur selama di Kampus, Dekrit 2017, Revolusi 2018, Diplomasi 2019, Dinamis 2020.
17. Kepada Adik Parlemen 21 yang selalu menghibur penulis.
18. Kepada Aqilah yang selalu membantu penulis dalam hal Printing.
19. Kepada Kanda Galank dan kanda Fikri yang selalu membantu penulis dalam penyusunan hasil penelitian ini.
20. Kepada Kawan – Kawan di DPR yang selalu menemani kekosongan Penulis di Kampus.

Serta kepada seluruh teman-teman yang penulis belum sempat tuliskan satu per satu. Meskipun telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan di dalamnya.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Literatur Review	7
2.2 Kerangka Teori dan Konsep	11
2.2.1 Teori Elit politik.....	11
2.2.2 Elit Lokal	13
2.2.3 Pilkada sebagai Arena Kontestasi Politik.....	20
2.3 Kerangka Pikir.....	22
2.4 Skema Pikir.....	24
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan penelitian.....	25

3.2 Tipe Penelitian.....	26
3.3 Lokasi dan objek Penelitian.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV.....	32
GAMBARAN UMUM	32
4.1 Dinamika pilkada Kabupaten Mamuju 2020.....	32
4.2 Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik di Kabupaten Mamuju.....	35
4.3 Jumlah Pemilih Pilkada Kabupaten Mamuju 2020	40
4.4 Profil singkat dari Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju	42
4.4.1 Sitti Sutina Suhardi (Bupati Terpilih).....	42
4.4.2 Ado Mas'ud (Wakil Bupati Terpilih).....	43
BAB V.....	45
PEMBAHASAN	45
5.1 Elit lokal di Kabupaten Mamuju Pada Pilkada 2020 Kabupaten Mamuju	45
5.2 Bentuk keterlibatan Elit Politik Lokal Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Mamuju	52
5.2.1 Elit dalam Sosial Capital	52
5.2.2 Elit dalam Politik Capital.....	56
5.2.3 Elit dalam Ekonomi Capital.....	60
BAB VI.....	66
PENUTUP.....	66
6.1 Kesimpulan.....	66
6.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu proses demokrasi nyata dan menjadi sarana bagi seluruh rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka kedepannya, Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang dipandang layak melaksanakan pemerintahan di suatu wilayah. Dengan adanya pilkada menjadi tempat untuk penyaluran hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada dapat menjadi proses pergantian pemerintahan secara transparan, aman, damai dan tertib bagi rakyat Indonesia.

Pilkada juga merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi antara pasangan politik untuk merebut kekuasaan di suatu wilayah atau daerah yang ditentukan oleh suara terbanyak dalam pemilihan. Dalam memperoleh suara pasangan calon menggunakan strategi masing-masing untuk memperoleh suara dari rakyat. Dalam menghadapi pemilu seperti pemilihan Bupati, banyak faktor yang harus menjadi fokus para kandidat peserta pemilihan Bupati ini, diantaranya adalah menciptakan kekuatan politik. Kekuatan politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-

lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas kekuatan politik. Keberhasilan dalam membentuk kekuatan politik dapat dilihat dari kemampuan aktor tersebut melaksanakan fungsinya. Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, aktor politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kekuasaan¹.

Berlangsungnya pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan harus terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 28G bahwa didalam negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

¹ Imam Mujahidi Fahmid, Identitas Dalam Kekuasaan, (Makassar : Inninawa 2012).h.28

Proses pemilihan kepala daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, tentang Sistem Pemerintah Daerah yang tercantum pada pasal 56 ayat 1 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada ayat 2 (dua), pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik (koalisi).²

Komisi Pemilihan Umum(KPU) menetapkan hari libur nasional dalam rangka Pilkada serentak 2020 di berbagai daerah pada tanggal 9 Desember 2020 untuk melaksanakan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala daerah. Salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak yaitu daerah Kabupaten Mamuju. Dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Mamuju, KPU menetapkan 2 (dua) pasang calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Habsi Wahid dan Irwan Satya Putra Pababari sebagai pasangan petahana melawan Siti Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud sebagai pasangan penantang.

Dinamika pilkada serentak 2020 di Kabupaten Mamuju melahirkan dua koalisi besar partai, diantaranya partai pengusung dari pasangan Petahana yaitu Nasdem dan Hanura disertai partai pendukung Golkar, Perindo dan PPP. Sedangkan dari koalisi penantang yaitu Sutina-Ado

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintah Daerah Pasal 56 ayat 1

diusung oleh partai Demokrat dan PDI serta didukung oleh partai Gerindra, PAN, PKS, PBB. Melihat dari koalisi yang terbentuk dari dua pasang calon cukupimbang.

Pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Mamuju ini antara pasangan Tina – Ado melawan pasangan Habsi – Irwan telah melibatkan pertarungan antar dua kubu elit lokal yang berpengaruh di kabupaten Mamuju, keterlibatan ini memantik konflik antar elit lokal di Kabupaten Mamuju untuk mengambil alih kekuasaan. Dalam hal ini pilkada serentak 2020 di Kabupaten Mamuju, dengan hadirnya dua pasang calon yang berkontestasi untuk memperoleh kepemimpinan di Kabupaten Mamuju, juga menjadi arena pertarungan antara elit politik lokal yang berpengaruh di Kabupaten Mamuju.

Menurut aturan yang ada di Indonesia, pilkada merupakan salah satu perwujudan demokrasi yang nyata. Pilkada merupakan suatu sarana legal untuk pergantian kekuasaan, hal ini terkadang membuat konflik untuk mengambil kekuasaan di suatu daerah. Begitulah yang terjadi di kontestasi politik di Kabupaten Mamuju. Dimana dalam pilkada serentak tahun 2020. Terjadinya konflik antar elit lokal untuk merebut kekuasaan di Kabupaten Mamuju.

Hal yang kemudian menarik bagi penulis yaitu melihat hasil ketetapan KPU dalam rapat pleno nya telah menetapkan pasangan calon Tina – Ado sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mamuju. Kemudian dengan strategi politik yang digunakan Tina – Ado dan pengaruh yang digunakan Elit lokal yang berada di pihaknya berhasil mengalahkan pasangan Petahana dan mengambil alih kekuasaan di Kabupaten Mamuju.

Berangkat dari fenomena tulisan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Keterpilihan Sutina – Ado dalam Pilkada 2020 Kabupaten Mamuju”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan elit lokal dalam keterpilihan Tina – Ado di PILKADA 2020 Kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi elit lokal di Kabupaten Mamuju, serta mengetahui bagaimana keterlibatan elit politik lokal dalam proses keterpilihan Tina-Ado dalam memenangkan kontestasi politik di PILKADA 2020 Kabupaten Mamuju.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka ada beberapa manfaat penelitian ini, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah menjadi acuan bagi pembaca atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana Elit lokal di Kabupaten Mamuju terlibat dengan proses keterpilihan Tina-Ado dalam memenangkan kontestasi politik di PILKADA 2020 Kabupaten Mamuju.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perkembangan dinamika politik serta ketelibatan elit lokal di Indonesia terutama mengenai strategi politik calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Utamanya di daerah Kabupaten Mamuju.

3) Manfaat Metodologis

Secara metodologis, penelitian ini diharapkan mampu lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis, serta nantinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan menjadi acuan dalam menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membicarakan tentang tinjauan literatur review dan tinjauan kerangka teoritis. Dalam bab ini menguraikan teori serta konsep yang berkaitan dengan: “**Keterpilihan Tina – Ado dalam Pilkada serentak 2020 Kabupaten Mamuju**”. Penelitian ini akan menggunakan Teori Elit Politik untuk melihat pengaruh elit lokal dalam proses keterpilihan Tina – Ado untuk memperoleh kemenangan di Pilkada serentak tahun 2020. Selanjutnya digunakan konsep pilkada sebagai arena kontestasi politik untuk melihat pengaruh elit lokal dalam proses keterpilihan pasangan Tina – Ado sebagai upaya memenangkan kontestasi politik di Kabupaten Mamuju.

2.1 Literatur Review

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “ Keterpilihan Tina – Ado dalam Pilkada 2020 Kabupaten Mamuju”. Penelitian ini bermaksud untuk melihat proses keterpilihan pasangan Tina – Ado dan mengungkap strategi yang dipakai dalam Pilkada serentak 2020. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan pertimbangan dan pendukung dalam Menyusun Karya tulis ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Fadli, dalam tesis nya (Muhammad Fadli, 2018)³ bertujuan untuk melihat bagaimana dampak

³ Muhammad Fadli, Tesis: “*Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015*” (Makassar: UNHAS, 2018)

keterlibatan Elit Politik Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi politik. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian beliau yaitu meningkatnya partisipasi politik di Kabupaten Toraja Utara tahun 2015, menurut penulis fenomena ini tidak terlepas dari peran Elit politik Lokal yang berada di Toraja Utara. Dalam penelitiannya juga beliau menggunakan skema berpikir konsep mengenai elit politik lokal, bagaimana kemudian keterlibatan elit politik lokal dapat meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Toraja.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2015 membawa dampak yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal ini dikarenakan peran elit lokal dan penyelenggara Pilkada dalam mensosialisasikan informasi tentang Pilkada, mendorong pemilih untuk memilih pemimpin politik serta menghimbau masyarakat untuk beretika dalam partisipasi politiknya terkait Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.

Penelitian Kedua yang dilakukan Hendra Pratama, dalam skripsinya (Hendra Pratama, 2014) ⁴bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran elite politik lokal terhadap masyarakat di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan persepsi masyarakat terhadap peran elite politik lokal di masyarakat menjelang pemilih presiden tahun 2014. Adapun yang

⁴ Hendara Pratama, Skripsi: *"Peran Elit Politik Lokal Terhadap Masyarakat Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar"* (Makassar: UIN, 2014)

latar Belakang Penelitian tersebut yaitu peran elit politik lokal dalam pemilihan Presiden tahun 2014 di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dimana Tingkat partisipasi Politik yang cukup baik di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam penelitiannya beliau menggunakan skema berpikir konsep mengenai peran elit politik lokal, bagaimana kemudian elit politik ini membantu mengkampanyekan calon Presiden 2014 di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu bagaimana elit politik lokal mempengaruhi masyarakat yang ada di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tidak golput dalam pemilihan presiden tahun 2014 sekaligus mensosialisasikan calon presiden tahun 2014.

Penelitian ketiga dilakukan Muhammad Zulfikar Suhardi dalam skripsinya (Muhammad Zulfikar Suhardi, 2020)⁵ bertujuan untuk melihat pengaruh Gender Dalam Pilkada serentak 2020. Adapun Latar belakang dari penelitian ini yaitu politik Identitas yang dibangun dan kemudian membentuk suatu identitas baru yang mewarnai proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di Mamuju. Melihat kebelakang dengan sejarah kepemimpinan yang ada di Kabupaten Mamuju, selama kabupaten ini terbangun, belum pernah ada sosok pemimpin perempuan di Kabupaten Mamuju. Dalam penelitiannya beliau menggunakan skema berpikir konsep

⁵ Muhammad Zulfikar Suhardi, Skripsi: "*Pengaruh Politik Identitas Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020*" (Makassar: UNHAS, 2020)

mengenai politik identitas gender, bagaimana kemudian masyarakat memberikan tanggapan dari penggunaan sentimen identitas gender di Kabupaten Mamuju.

Adapun yang menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan beliau, yaitu penerimaan masyarakat terhadap calon bupati perempuan di Kabupaten Mamuju saat ini bisa dikatakan sangat diterima di masyarakat apabila ada seorang perempuan yang ingin maju sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Mamuju walaupun hanya sebagian kecil masyarakat yang memberikan penolakan terhadap perempuan apabila dibenturkan dengan mereka yang cukup menganut pemahaman agama Islam yang cukup kuat namun secara umum masyarakat di Kabupaten Mamuju menerima dengan sangat baik sosok perempuan.

Jika melihat dari semua penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dan hasil yang ingin dicapai yaitu untuk menggambarkan pengaruh elit politik lokal dalam peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan umum dengan menggunakan teori elit politik maupun teori partisipasi politik. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu ingin melihat keterlibatan elit politik lokal dalam pemilihan kepala daerah, dalam hal ini pilkada serentak 2020 Kabupaten Mamuju. Dengan menggunakan pendekatan teori elit politik dan konsep pilkada sebagai arena kontestasi politik dan konsep pilkada sebagai arena kontestasi politik, penulis berharap akan menghasilkan penelitian yang berguna untuk kedepannya.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori elit politik sebagai Pisau analisis untuk melihat pengaruh yang digunakan elit politik Lokal untuk memenangkan Pilkada serentak 2020 Kabupaten Mamuju. Dan, dan menggunakan konsep pilkada sebagai arena kontestasi politik untuk mengukur keterlibatan elit politik lokal dalam pilkada serentak di Kabupaten Mamuju.

2.2.1 Teori Elit

Ilmu politik sebagai suatu khazanah keilmuan ruang lingkup ranah pembahasannya dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) ranah, yaitu: pemikiran, kelembagaan, dan kekuasaan. Terkait hal tersebut kajian tentang teori elit masih relevan untuk dibahas.

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.⁶

⁶Muttaqin Khabibullah, Toeri Elit (2016) Teori Elit – Muttaqin Khabibullah (muttaqinhabibullah.blogspot.com) diakses pada tanggal 2 oktober 2021.

Pareto dan Mosca (1939) mendefinisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michels yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell (1978) berpendapat bahwa elite sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting.⁷

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah *the ruling class*, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah produk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antar elite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi

⁷ S.P. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, hlm. 35

dilanjutkan atau diterjemahkan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya⁸.

Meminjam istilah Laclau & Mouffe, Escobar & Alvares. Serta Mohan & Stokke, perjuangan atau gerakan mereka biasanya dideskripsikan sebagai bentuk resistensi melawan 'pusat' yang selama masa sebelumnya menghimpun dan menggerakkan semua kekuatan untuk menundukkan daerah baik di dalam maupun di luar arena politik formal. Akibatnya aras politik di aras lokal menjadi tidak berkembang dan berlangsung menguncup. Keadaan ini menimbulkan berbagai resistensi kultural (misalnya gerakan akar rumput dan menyerukan nilai-nilai lokal) yang memerlukan pencarian alternatif dalam pembangunan daerah. Sebagai dampak dari munculnya 'politik baru', maka lanskap politik Indonesia juga berubah. Otonomi daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung serta pembagian kewenangan secara tegas antara pusat dan daerah merupakan salah satu dari sekian dampak dari 'politik baru' tersebut.⁹

2.2.2 Elit Lokal

Dilihat dari sisi tingkatan, politik dibagi menjadi tiga bagian; politik global, nasional dan lokal. Politik global membahas masalah politik tingkat dunia yang melibatkan antar negara, dalam satu benua atau lebih untuk membicarakan masalah dan kepentingan bersama. Politik nasional

⁸ HM, Nasruddin Anshoriy Ch, Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm 04

⁹ Dr. Abdul Chalik, PERTARUNGAN ELITE DALAM POLITIK LOKAL, hlm 45.

merupakan level politik tingkat negara, dengan isu pokok perpolitikan di level nasional. Sementara politik lokal menyangkut masalah dan isu politik di tingkat lokal, baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota, atau bahkan di level desa sekalipun. Kata politik lokal menunjuk pada persoalan dan isu politik di level yang lebih terbatas, dan menyangkut persoalan yang berkembang di tingkat lokal.¹⁰

Secara akademik, lahirnya UU No. 32 tahun 2004 telah memperkaya khazanah kajian keilmuan. Jika sebelumnya (era Orde Baru) isu-isu politik hanya bertumpu pada Pemilu Legislatif dan politik birokrasi yang hegemonik, dan corak politik yang sentralistik, serba komando dari pusat, maka selama satu setengah decade terakhir sudah mengalami lompatan yang luar biasa. Isu politik nasional, terutama Pileg dan Pilpres tetap menjadi topik utama, tetapi isu-isu lokal tidak kalah menariknya. Dina-
viii Dr. Abdul Chalik mika pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta pasang surut hubungan eksekutif-legislatif merupakan tontonan yang mengundang daya tarik akademik.¹¹

Hal menarik dalam dinamika politik lokal dapat dilihat dalam esai-esai yang ditulis oleh beberapa penulis yang kemudian dikemas oleh Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken dalam sebuah buku yang berjudul "*Politik Lokal di Indonesia*". Yang menarik dari esai-esai yang ada dalam buku tersebut yakni adanya kesan pesimistis terhadap hadirnya sistem

¹⁰ Dr. Abdul Chalik, *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*, hlm V.

¹¹ Dr. Abdul Chalik, *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*, hlm VII-VIII.

desentralisasi yang tercermin dalam demokratisasi di berbagai daerah. Desentralisasi yang tujuannya untuk pengembangan daerah secara mandiri justru lebih didominasi oleh pertarungan elite politik maupun elite birokrasi. Monopoli kekuasaan di daerah-daerah tertentu juga menambah catatan hitam desentralisasi di Indonesia. Akibatnya desentralisasi justru menjadi identik dengan oligarki pada tatanan lokal. Selain itu, adanya desentralisasi oleh para elite politik justru menjadi persoalan baru.¹²

Kasus oligarki dan otoritarianisme baru sebagai akibat dari otonomi politik mencuat di mana-mana. Sebagaimana contoh di beberapa negara seperti yang diungkap Sidel.¹³ Di Filipina, terutama di Cebu dan Cavite, kawasan pinggiran kota yang dipenuhi oleh kemudahan bagi lahan industri, lapangan golf, kompleks perumahan dan wisata mewah, para bos ekonomi lokal yang telah menjadi politisi banyak menggunakan kekuasaan diskresinya untuk menetapkan peruntukan pembangunan. Tidak hanya itu, penentuan pengembangan wilayah di bawah kekuasaan mereka. Bahkan tidak jarang dengan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kepentingan ekonominya.¹⁴

Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa keberadaan dan peran elit lokal tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan yang terjadi pada sistem politik yang melingkupinya. Perubahan yang terjadi pada sistem politik membawa pengaruh selain terhadap hubungan antara

¹² Ibid, hlm 47.

¹³ Leo Agustino, M. Agus Yusoff, "Politik di Indonesia...", 10.

¹⁴ Dr. Abdul Chalik, *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*, hlm 48

elit dengan massa, juga terhadap hubungan antara elit dengan negara. Perubahan yang berlangsung menjadikan massa tidak lagi sebagai objek yang pasif dalam hubungannya dengan elit. Demikian pula elit untuk mempertahankan posisinya tidak bisa hanya dengan menyandarkan pada negara (pemerintah), tetapi harus mampu melakukan kalkulasi taktis untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, dapat pula dinyatakan bahwa di kalangan internal elit berlangsung dinamika, di mana masing-masing individu elit saling bersaing untuk mempertahankan posisi dan peranannya. Oleh karena itu, dengan terjadinya perubahan sistem politik, elit politik lokal harus mampu menyusun strategi untuk bisa meraih dan mempertahankan posisi dan perannya.¹⁵

Marie Kolabinska berpendapat mengenai beberapa tipe dari sirkulasi elit ini. Pertama, sirkulasi elit yang berlangsung di antara mereka yang tergabung dalam "*the governing elite*". Kedua, sirkulasi elit yang berlangsung antara mereka yang tergabung dalam "*Non governing elite*" dengan massa. Tipe kedua mungkin mengambil bentuk: (a) individu – individu yang berasal dari strata bawah (massa) yang berhasil masuk ke dalam jaringan elit, dan (b) individu- individu dari strata bawah (massa) yang membentuk kelompok elit baru dan melakukan perjuangan melawan elit yang ada guna memperoleh kekuasaan.¹⁶

¹⁵ Haryanto, *Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik*, hlm 135

¹⁶ Bottomore. *Op. cit.*, hlm 49.

Menurut Thompson, bahwa elit lokal terdiri dari berbagai bentuk, berdasarkan pada sumberdaya yang dimilikinya yaitu: *Pertama*, elit lokal yang muncul karena kekuatan ekonomi yang dimiliki. Dalam hal ini, melihat penguasa atau tuan tanah daerah yang mampu menggerakkan masyarakat disekitarnya diatas fundamental ekonominya itu. *Kedua*, elit lokal kemunculannya bersumber dari kekuasaan publik yang melekat pada dirinya. Dalam hal ini, berbagai pejabat birokrasi di daerah yang dapat menentukan arah sosial dan mengendalikan warga sekitarnya.

Dalam hal ini, elit lokal adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan atas wilayah atau daerah tertentu seperti, tokoh masyarakat, tokoh agama, tuan tanah. ada juga elit lokal yang berupa pejabat yang mempunyai kekuatan di suatu wilayah atau daerah, kekuatan itu meliputi seseorang yang sedang menduduki jabatan politik seperti eksekutif atau legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis di tingkat lokal seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD dan Pimpinan Partai Politik.

James Scott, peneliti yang banyak menyajikan model tentang bagaimana interaksi antara pemilih dan politisi terbentuk sebagai potret bagaimana relasi antara para tuan tanah dan petani-penggarap di banyak negara di Asia Tenggara. Menurut Scott, di seluruh wilayah ini para petani-penggarap menyediakan jasa dan tenaga bagi para tuan tanah dimana mereka mengabdikan, dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan ketika mereka menghadapi kesulitan hidup.

Dengan mematkan diri mereka ke dalam relasi pertukaran semacam ini, para klien berusaha memperoleh jaminan keamanan dalam lingkungan kehidupan yang keras dan tidak tentu. Ketika pemilihan umum dilakukan dan memasuki kehidupan mereka di kampung, para klien itu memperoleh sebuah sumber daya politik yang baru, karena hanya dengan memberikan atau menahan suaranya mereka telah berpengaruh bagi nasib sang calon untuk kedudukan yang dikejanya¹⁷. Dalam pandangan Aspinall, para politisi dan partai politik beradaptasi dengan pola-pola relasi yang usianya ratusan tahun tersebut, meskipun perluasan pengaruh negara kolonial dan pascakolonial seringkali telah menggerogoti kewajiban timbal balik antara para tuan tanah dan petani penggarapnya.¹⁸

Selama ini, penggunaan sumber daya materi untuk memobilisasi massa pemilih menjadi kecenderungan yang dipilih oleh kandidat pada ajang pemilu di semua level, baik di level daerah maupun nasional. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Aspinall dan Sukmajati misalnya, menyebut adanya penggunaan materi dalam bentuk patronase yang dapat berupa pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya.¹⁹ Patronase Klientelisme merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung.

¹⁷ James C Scott, —The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asiall, *The Journal of Asian Studies* Vol. 32, No. 1 (November, 1972). Lihat juga James C Scott, —Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asiall, *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (March 1972)

¹⁸ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale; Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, h. 30-31.

¹⁹ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, —Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Polgov 2015), h. 4-5.

Sebaliknya, klientelisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.²⁰

Aspinall juga menyebut bahwa relasi politik klientelistik memiliki akar sejarah yang cukup dalam di dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut terpotret misalnya pada masa pra kolonial. Masyarakat pra-kolonial mendasarkan hidupnya dengan bergantung pada gaya pemerintahan yang personalistik. Majapahit, Mataram dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya dibangun di atas hubungan yang pada umumnya tidak tersistem tetapi hubungan patron-klien antara yang memerintah dan taklukan dipersubur oleh suatu rasa yang akan kewajiban timbal balik. Meski demikian, hal ini bukanlah hal yang aneh sebagaimana ditunjukkan Mungiu-Pippidi (2015) dan Fukuyama (2011), pertukaran manfaat yang terpersonalisasi telah menjadi bentuk organisasi sosial yang dominan di seluruh sejarah kehidupan manusia.²¹ Kendati memiliki akar sejarah yang kuat, namun kepustakaan tentang bentuk-bentuk klientelisme di Indonesia masih relatif sedikit, padahal berbagai istilah patronase, klientelisme dan patrimonialisme kerap kali muncul dalam diskursus tentang politik Indonesia. Relasi pertukaran klientelistik juga kerap kali dipersalahkan karena dianggap sebagai penyebab berbagai masalah, mulai dari soal lemahnya partai politik, lemahnya pelayanan public, konflik antar etnik, dan dominasi politik oleh para elit ekonomi.²²

²⁰ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *ibid.*

²¹ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *ibid.*, h. 31.

²² Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Ibid.*, h. 29-30

2.2.3 Pilkada sebagai Arena Kontestasi Politik

Pilkada merupakan proses demokrasi secara prosedur dan substansial dengan cara memilih aktor politik yang akan memimpin suatu wilayah dan kemenangannya akan ditentukan melalui perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara diberi kebebasan untuk membentuk organisasi politik, sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut berkompetisi dalam konstelasi politik di Indonesia.

Dalam peraturan Undang-Undang dalam pelaksanaannya sendiri sudah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 Tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Berdasarkan uraian Undang- Undang tersebut tentang pilkada maka dalam pemilihan kepala daerah menjadikan sebuah kontestasi politik yang dilaksanakan 5 tahun sekali diadakan untuk menanti pergantian pemimpin daerah. Pilkada diharapkan dapat menyalurkan hak suara dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam proses pilkada sebagai arena kontestasi politik yaitu sebagai pertarungan antar kandidat pasangan calon, yang dimana proses politik yang terjadi dengan pertempuran antara dua pasang atau lebih dalam 1 kontestasi politik, dengan bermodalkan partai politik sebagai sarana antara

²³ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 3Ayat 1.

kandidat masing-masing menjalankan strategi mereka dengan baik untuk memenangkan kontestasi.

Menurut pernyataan dari Stella Pantouw, secara metaforanya kita bisa menggambarkan bahwa kontestasi itu ibarat balapan mobil, mengapa demikian? jika pasangan calon ingin memenangkan kontestasi Pilkada maka calon harus mempunyai tiga kombinasi dalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual menurut Pantouw, metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi dalam pemilukada yaitu (1) modal politik (political capital) (2) modal sosial (social capital) dan (3) modal ekonomi (economical capital). ketiga modal ini dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.²⁴

Adapun pada pilkada yang terjadi di Kabupaten Mamuju dengan munculnya dua pasang calon yang akan bertarung dalam 1 kontestasi politik yang sama. Untuk memenangkan kontestasi dan merebut kursi kekuasaan yang ada di Kabupaten Mamuju, kedua pasang calon mengeluarkan semua modal yang mereka punya termasuk elit politik lokal

²⁴ Stella Ignasia Pantouw.2012. Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Modalitas Dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh Dan Maximiliaan Lomban Pada Pemilukada Di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010).Thesis.Tidak Dipublikasikan.Univerisitas Diponogoro.hlm 3

mereka, sehingga mengubah pilkada sebagai arena kontestasi guna perebutan kursi kekuasaan yang ada di Kabupaten Mamuju.

2.3 Kerangka Pikir

Pasangan Tina – Ado dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Mamuju adalah suatu fenomena di Mamuju menurut penulis, dimana pasangan Tina – Ado ini menantang dan akan berhadapan dengan Pasangan Petahana yaitu Habsi – Irwan. Dimana kontestasi yang ada di Kabupaten Mamuju dimenangkan oleh pasangan Tina – Ado. hal ini menyebabkan sebuah pertanyaan bagi penulis karena pasangan Tina – Ado ini berhasil mengalahkan pasangan Habsi – Irwan yang dimana beliau adalah Pasangan Petahana yang berkuasa di Mamuju sebelumnya.

Sesuai dengan pernyataan dari stella pantouw bahwa untuk mencapai kemenangan di kontestasi politik dibutuhkan setidaknya modal untuk mencapai itu yaitu modal ekonomi, modal politik, dan modal sosial, keterpilihan. Sesuai dengan pernyataan dari Stella Pantouw bahwa untuk memenangkan kontestasi politik harus mempunyai 3 modal besar yaitu modal ekonomi, modal sosial, dan modal politik, melihat akan hal itu pasangan Tina – Ado menggunakan power elit politik lokal yang mendukungnya untuk memenangkan kontestasi politik di Kabupaten Mamuju.

Keterpilihan Tina – Ado dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Mamuju ini tidak lepas dari pengaruh yang digunakan oleh elit lokal yang berada di pihak Tina – Ado, mulai dari Ekonomi Capital, Politik Capital, hingga Sosial Capital yang digunakan para elit politik lokal untuk memenangkan pasangan Tina – Ado.

Dari penjelasan tersebut maka penulis lebih menekankan untuk melihat bagaimana keterlibatan Elit Politik Lokal dalam memenangkan Pilkada serentak 2020 di kabupaten Mamuju dengan menggunakan teori elit politik untuk melihat bagaimana keterlibatan elit politik lokal dalam pilkada serentak 2020 kabupaten Mamuju dan menggunakan konsep pilkada sebagai arena kontestasi politik sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana kontestasi politik yang terjadi di kabupaten mamuju.

2.4 Skema Pikir

